

RINGKASAN

Arafah
NIM. 217410101021

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON (Studi
Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor
33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor
79/Pid.B/2022/PN.Tkn)**

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H)

Secara teori, disparitas penjatuhan pidana dapat berimplikasi pada munculnya ketidakadilan terutama bagi pelaku yang menerima penjatuhan pidana. Hal ini pulalah yang terjadi pada beberapa kasus di Pengadilan Negeri Takengon tepatnya pada kasus dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas putusan hakim yang dapat terjadi atas tindak pidana pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP terhadap tiga putusan di Pengadilan Negeri Takengon dan untuk mengetahui boleh atau tidaknya hakim melakukan Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selain itu juga menggunakan sumber data sekunder yang terbagi kepada tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, terjadinya karena beberapa hal yang meliputi 1) Faktor kebebasan hakim dalam menilai. 2) Faktor perbedaan keadaan yang memberatkan dan meringankan di antara tiga perkara tersebut. 3) Faktor perbedaan akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku pada ketiga perkara tersebut. Disparitas penjatuhan pidana pada perkara pencurian dengan pemberatan khususnya pada tiga Putusan yang ada adalah hal yang boleh dan lumrah terjadi. Disparitas pada ketiga perkara ini terbentuk dengan sendirinya karena tiap-tiap perkara memiliki fakta hukumnya sendiri-sendiri.

Disarankan kepada pemerintah dan Mahkamah Agung diharapkan ke depannya agar diformulasikan *sentencing guidelines* bagi para hakim agar dapat meminimalisir terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Adapun kepada para hakim, diharapkan agar senantiasa memformulasikan putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Disparitas, Penjatuhan Pidana, Pencurian dengan Pemberatan

SUMMARY

Arafah
NIM. 217410101021

**DISPARITY OF CRIMINAL SENTENCES IN
CASES OF AGGRAVATED THEFT IN TAKENGON
DISTRICT COURT (Study of Decisions Number
13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn
and Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn
13/Pid.B/2022/PN.Tkn)**

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H)

In theory, disparity in sentencing can have implications for the emergence of injustice, especially for perpetrators who receive sentences. This is also what happened in several cases at the Takengon District Court, precisely in cases with decisions number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, decision number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn 13/Pid.B/2022/PN.Tkn. This study aims to determine the disparity in judges' decisions that can occur for criminal acts under Article 363 Paragraph (1) Ke 5 of the Criminal Code against three decisions at the Takengon District Court and to determine whether or not judges can carry out Disparity in Sentencing in Aggravated Theft Cases at the Takengon District Court.

This study uses a qualitative research type with an empirical legal research approach. The data sources in this study are primary data sources consisting of the results of interviews with respondents and informants. In addition, it also uses secondary data sources which are divided into three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed using qualitative data analysis techniques.

The results of this study found that the occurrence of disparities in sentencing in decisions number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, decision number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, occurred due to several things including 1) the factor of the judge's freedom in assessing. 2) Factors of differences in aggravating and mitigating circumstances between the three cases. 3) Factors of differences in the consequences caused by the perpetrators in the three cases. Disparities in sentencing in aggravated theft cases, especially in the three existing Decisions, are something that is permissible and common. Disparities in these three cases are formed by themselves because each case has its own legal facts.

It is suggested to the government and the Supreme Court that in the future sentencing guidelines be formulated for judges in order to minimize disparities in sentencing. As for judges, it is expected that they will always formulate decisions by considering various aspects including legal certainty, legal justice and legal benefits.

Keywords: Disparity, Criminal Sentences, Aggravated Theft